

## **ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Oleh

**Mega Pertiwi Dan Evi Zubaidah**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the Strategy Increasing Land Revenue Tax Rural and Urban Sector in Pekanbaru City Revenue Board. The strategy research indicators used include different competencies, scope, resourcedistribusi. Research method used is quantitative method that is by interview and interact with people in place of research. This research is categorized as a descriptive research that prioritized the questionnaire as a means of collecting data and collected data then used as the main raw material to analyze. The empirical condition of objectivity of the existence of the researcher's objectives at the location under study. The sampling technique used in this research is using census technique method or saturated sample. The types and techniques of data collection used consisted of primary data collected by questionnaire, interview and documentation techniques and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency tool. This study aims to analyze the strategy of increasing the receipt of tax on the earth and building the rural and urban sector in the city's revenue agency Pekanbaru. Because the strategy is very important to see how far the taxes of the earth and buildings can be realized through the strategy. Based on this analysis technique, the researcher concludes that the Analysis of Increasing Strategy of Increasing Land and Building Tax of Rural and Urban Sector In Pekanbaru City Revenue Board is in the accomplished category.*

*Keywords: Strategy, Property Tax.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Indikator penelitian strategi yang dipergunakan meliputi kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, distribusi sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu dengan cara wawancara dan berinteraksi dengan orang ditempat penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode teknik sensus atau sampel jenuh. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik kuisisioner, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik obsevasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu frekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Karena strategi sangat penting untuk melihat sejauh mana Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi melalui strategi tersebut. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaa Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berada pada kategori terlaksana.

Kata Kunci :Strategi, Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan maksud dan tujuan agar pemerintah daerah mampu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bertanggung jawab di daerahnya sesuai dengan tujuan desentralisasi. Tujuan dari desentralisasi tersebut perlu adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan pada pemerintah daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan dan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Kemampuan mengelola keuangan adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi suatu daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi yang ada didaerahnya. Sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pusat dan daerah adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Didalam struktur pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah merupakan unsur atau komponen yang paling besar dari sumber penerimaan daerah yang potensial, maka dari itu harus digali dan dikembangkan secara maksimal. Kontribusi iyalah yang menyebabkan didaerah banyak bermunculan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terhutang oleh sumber dana pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti sejauh mana pendapatan dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Tingkat kesadaran masyarakat akan mempengaruhi kesadaran mereka membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan kata lain kesadaran masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena akan mendorong kerelaan masyarakat dalam membayar pajak, Namun jika tidak didukung dengan kesadaran yang tinggi maka masyarakat akan tetap enggan membayar pajak.

**Tabel 1 : Sumbangsih Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016**

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pencapaian (%)
1	2014	290.932.820.954	445.390.930.196	65
2	2015	357.365.525.616	492.212.805.175	72
3	2016	390.323.492.883	462.736.877.871	84

*Sumber Data : Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Badan Pendapatan Daerah, 2017*

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi, dan pencapaiin Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 realisasi pajak daerah sebanyak 290.932.820.954, realisasi pendapatan asli daerah 445.390.930.196, dengan pencapaian 65 %. Pada tahun 2015 realisasi pajak daerah sebanyak 357.365.525.616, realisasi pendapatan asli daerah 492.212.805.175 , dengan pencapaian 72%. Pada tahun 2016 realisasi pajak daerah sebanyak 390.323.492.883, realisasi pendapatan asli daerah 462.736.877.871, dengan pencapaian 84%. Realisasi pajak daerah dari tahun 2015-2016 terus meningkat, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2016 menurun, sedangkan pencapaian pajak daerah dan pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2014-2016.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat fenomena sebagai berikut:

- a. Masih adanya wajib pajak yang belum melakukan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
- b. Masih kurang maksimalnya pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.
- c. Sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Bagaimanakah Analisis Strategi PeningkatkanPenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru’”.

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengenali hambatan dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
  - a) Kegunaan teoritis  
Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik minimal dapat memperkaya infentaris hasil-hasil penelitian dibidang kebijakan pada umumnya, dan infentaris ilmu penelitian dibidang implementasi kebijakan
  - b) Kegunaan akademis  
Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama

- c) Kegunaan praktis  
Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah dikota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

### **Studi Kepustakaan Konsep Administrasi**

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Syafri Wirman 2008:10) “orang yang dapat memulai dengan menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama”.

Siagian (dalam Syafri Wirman 2008:9) memberi pengertian tentang administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk trujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Simond dkk (dalam Syafri Wirman 2012:8) mengatakan bahwa administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

### **Konsep Organisasi**

Zulkifli (2005 ; 73) yang mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Griffin (dalam Kurniawan, Erni2002:4) Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

### **Konsep Manajemen**

Stoner (dalam Zulkifli 2009:17) mengatakan bahwa manajemen adalah

proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan

Menurut Nickels, McHugh and McHug (dalam Kurniawan, Erni 2010 ; 6) yang mengatakan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

### **Konsep Strategi**

Strategi menurut Griffin (dalam Kurniawan, Erni 2000;132) adalah strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Strategi menurut Marrus (dalam Umar 2008:31) adalah sebagai suatu proses penentu rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

### **Konsep Peningkatan**

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu peningkatan juga berarti

pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

**Konsep Penerimaan**

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output dengan kata lain merupakan

segala pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produknya.

Selain itu penerimaan adalah suatu hasil yang dicapai pemerintah daerah dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan.

**Operasional Variabel**

**Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel tentang Analisis Strategi Peningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Katagori
Strategi menurut Griffin (2000;132) adalah sebagai rencana komprehensif yang mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak BumidanBan gunan diKota Pekanbaru	1.Kompetensi yang berbeda	a. Organisasi melakukan dengan baik	Terlaksana
			b. Kelebihan organisasi dengan organisasi lain	Cukup terlaksana
		2.Ruang lingkup	a. Kegiatan organisasi	Kurang terlaksana
			b. Strategi yang dimiliki organisasi	Terlaksana
		3.Distribusi sumber daya	a. Manfaat sumber daya	Cukup terlaksana
			b. Mendistribusi kan sumber daya yang dimiliki	Kurang terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis 2017

**Teknik Pengukuran**

Terlaksana : Apabila Analisis Strategi Peningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menjakan empat indikator yang ada atau jawaban

responden pada katagori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.  
Cukup Terlaksana : Apabila Analisis Strategi Peningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru telah menjalankan dua hingga tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada katagori cukup terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila Analisis Strategi Peningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menjalankan pada katagori kurang terlaksana dengan

presentase antara 0% - 33%.

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi dengan menganalisanya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinterasi dengan orang-orang ditempat penelitian.

### Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pemilihan Badan tersebut merupakan yang bertugas dan memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru.

## Populasi dan Sampel

**Tabel 3 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang PBB	1	1	100%
2	Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB	1	1	100%
3	Pegawai Bagian Pendataan	20	20	100%
Jumlah		22	22	100%

Sumber : Data Penelitian 2017

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, pendekatan langsung kepada objek penelitian serta menganalisisnya guna

- memperoleh berbagai data terutama data skunder yang terkait dengan penelitian ini dengan alasan untuk mengetahui situasi dan kondisi pada objek penelitian.
2. Wawancara adalah merupakan tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai judul dan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai sumber informasi dan sumber-sumber data agar penulisan penelitian menjadi lebih lengkap dan valid.
  3. Angket adalah mengajukan daftar pertanyaan kepada responden yang selanjutnya hasil jawaban responden digunakan untuk mendapatkan data yang objektif dari responden dengan cara membuat beberapa alternatif

jawaban untuk dijawab sesuai dengan keadaan responden.

4. Dokumentasi yaitu data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian, seperti pengamatan atau mengumpulkan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian, seperti pengamatan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian.

### Hasil dan Pembahasan Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

#### 1. Kompetensi Yang Berbeda

**Tabel 4 : Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dilihat dari Indikator Kompetensi Yang Berbeda**

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Memberikan kemudahan masyarakat untuk mendaftar atau membayar pajak	20 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	20 (100%)
2	Informasi yang disampaikan kepada wajib pajak dengan jelas	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Melakukan pendataan terhadap objek pajak yang belum terdata	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Memberikan teguran pada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		78	2	0	80
Rata-rata		19	1	0	20
Persentase		95%	5%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel dapat diketahui bahwa untuk indikator kompetensi yang berbeda diperoleh tanggapan responden pegawai yang menjawab terlaksana ada 19 orang dengan persentase 95%, sedangkan yang menjawab cukup terlaksana ada 1 orang dengan

persentase 5%, dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Maka secara keseluruhan untuk indikator kompetensi yang berbeda dari pegawai sebanyak empat pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan berada pada kategori 'terlaksana'.

Hal ini dikarenakan pada item pertanyaan kemudahan untuk mendaftar atau membayar pajak pegawai menjawab terlaksana sebanyak 20 orang atau sebesar 100%, dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0), dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

Untuk item pertanyaan informasi yang disampaikan kepada wajib pajak pegawai menjawab terlaksana sebanyak 20 orang atau sebesar 100%, dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0), dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

Untuk item pertanyaan melakukan pendataan terhadap objek pajak yang belum terdata pegawai

menjawab terlaksana sebanyak 18 orang atau sebesar 90%, dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang atau sebesar 10%. Dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0). Karena responden ini sudah diberikan arahan dari kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan untuk melakukan pendataan terhadap objek pajak.

Untuk item pertanyaan memberikan teguran pada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya pegawai menjawab terlaksana sebanyak 20 orang atau sebesar 100%, dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0), dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

## 2. Ruang Lingkup

**Tabel 5 : Tanggapan responden pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dilihat dari Indikator Ruang Lingkup**

No	Item Pertanyaan	Katagori Penilaian			Jumlah
		C	CT	KT	
1	Kegiatan organisasi yang dilakukan untuk meningkatkan PBB	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Faktor pendukung dalam melaksanakan program atau kegiatan	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Mengoptimalkan fungsi manajemen pembangunan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat	6 (30%)	14 (70%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		62	18	0	80
Rata-rata		15	5	0	20
Persentase		75%	25%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel dapat diketahui bahwa untuk indikator ruang lingkup diperoleh dengan tanggapan responden pegawai yang menjawab terlaksana ada 15 orang dengan persentase sebanyak 75%, sedangkan pegawai yang menjawab cukup terlaksana ada 5 orang dengan persentase sebesar 25%, dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Maka secara keseluruhan untuk indikator ruang lingkup dari pegawai sebanyak 4 pertanyaan yang dapat diajukan dapat disimpulkan berada berada pada katagori ‘terlaksana’.

Hal ini dikarenakan pada item pertanyaan kegiatan organisasi pegawai menjawab terlaksana sebanyak 18 orang atau sebesar 90% , dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang atau sebesar 10%, dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

untuk item pertanyaan faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 18 orang atau sebesar 90%, dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang atau sebesar 10%, dan pegawai

### 3. Distribusi Sumber Daya

**Tabel 6 : Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dilihat dari Indikator Distribusi Sumber Daya**

No	Item Pertanyaan	Katagori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Fasilitas yang dimiliki Bapenda masih layak pakai	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Bapenda memiliki anggaran yang cukup	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Kewenangan tertinggi dalam memutuskan permasalahan	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dalam peningkatan PBB	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		76	4	0	80
Rata-rata		19	1	0	20
Persentase		95%	5%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

untuk item pertanyaan mengoptimalkan fungsi manajemen pembangunan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang atau sebesar 100%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0), dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

untuk item pertanyaan meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat, pegawai yang menjawab terlaksanan sebanyak 6 orang atau sebesar 30%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 orang atau sebesar 70%, dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0). Karena responden ini sudah diberikan arahan dari kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat.

Dari tabel dapat diketahui bahwa untuk indikator mendistribusikan sumber daya diperoleh tanggapan responden pegawai yang menjawab terlaksana ada 19 orang dengan persentase 95%, sedangkan yang menjawab cukup terlaksana ada 1 orang dengan persentase 10%, dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan 0%. Maka secara keseluruhan untuk indikator distribusi sumber daya dari pegawai sebanyak 4 pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan berada pada katagori 'terlaksana'.

Hal ini dikarekan pada item pertanyaan fasilitas yang dimiliki Bapenda masih layak pakai, pegawai yang menjawab terlaksana ada 20 orang atau sebesar 100%, dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0), dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

Untuk item pertanyaan Bapenda memiliki anggaran yang cukup, pegawai yang menjawab terlaksana ada 18 orang atau sebesar 90%, dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana ada 2 orang atau sebesar

10%, dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0). Karena responden ini sudah diberikan arahan dari kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bapenda memiliki anggaran yang cukup.

Untuk item pertanyaan kewenangan tertinggi dalam memutuskan permasalahan, pegawai yang menjawab terlaksana ada 18 orang atau sebesar 90%, dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana ada 2 orang atau sebesar 10%, dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

Untuk item pertanyaan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dalam meningkatkan PBB, pegawai yang menjawab terlaksana ada 20 orang atau sebesar 100%, dan pegawai yang menjawab cukup terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0), dan pegawai yang menjawab kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0). Karena responden ini sudah diberikan arahan dari kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

**Tabel 7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Bidang Pajak Bumi dan Bangunan**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Kompetensi yang berbeda	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Ruang lingkup	15 (75%)	5 (25%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Distribusi sumber daya	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		53	7	0	60
Rata-rata		18	2	0	20
Persentase		90%	10%	0	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap 3 item penilaian yang penulis ajukan kepada pegawai Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru Bidang Pajak Bumi dan Bangunan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban responden diatas sebanyak 17 orang atau sebesar 85% responden menyatakan terlaksana, kemudian sebanyak 3 orang atau sebesar 15% responden menjawab cukup terlaksana dan responden yang menyatakan kurang terlaksana tidak ada atau sama dengan nol (0).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perdesaan dan Perkotaan Pada badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang dapat dilihat dari 3 (tiga) indicator diatas yaitu :
  - a. Kompetensi yang berbeda digolongkan dalam kategori Terlaksana
  - b. Ruang Lingkup digolongkan dalam kategori Terlaksana
  - c. Distribusi Sumber Daya digolongkan dalam kategori Terlaksana
2. Adapun Kendala-kendala yang dialami oleh badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Terkait Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Masih minimnya sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak mematuhi kewajibannya.
- c. Minimnya kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar pajak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi program oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak (WP) PBB Kota Pekanbaru, sehingga pemahaman masyarakat khususnya yang wajib pajak (WP) PBB bisa lebih memahami aturan dan sanksi yang berlaku terkliat dengan pembayaran wajib pajak PBB di Kota Pekanbaru.
2. Perlu adanya peningkatan pemberian sanksi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada wajib pajak yang menunggak. Sehingga tingkat kemacetan pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru dapat diturunkan dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terus ditingkatkan.
3. Perlu adanya kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak bumi dan bangunann dalam membayar pajak.

Sehingga pendapatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijadikan sebagai APBD Kota Pekanbaru yang berguna untuk meningkatkan pembangunan Kota Pekanbaru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Andriani, P J. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta : Penerbit UI
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia
- BrantasM.Pd. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Salemba Empat : Jakarta
- Hamonangan, Imam Muklis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
- Hasibuan, Melayu S.P. 2006. *Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta :
- Kaho.2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Cendana Prenada Group
- Kurniawan, Erni. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Kencana
- Lubis, Irwansyah, & Djuanda, Gustian, & Lubis, Ardiansyah. 2010. *Review Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi
- Muljono, djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Munawir. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty
- Rahman, Abdul. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa
- Sinambela, Lijan, Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sitorus, Monang. 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : UNPAD
- Soemitro, Rahman. 2001. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sufian, Hamim. 2003. *Administrasi Organisasi dan Manajemen, Suatu Ilmu Teori Konsep Aplikasi*. Pekanbaru : UIR Press
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sumita, Praja. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Tjahjono, Ahmad. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tripono, Tedjo dan Udan. 2005. *Manajemen Strategi*. Bandung : Rekayasa Salas
- Ulbert, Silalahi. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Umar, Husein. 2008. *Strategic Manajement in Action*. Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo,& Wirawan. B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Yuni, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Zulkifli.2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.Pekanbaru : UIR Press

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press

**Dokumentasi:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 231/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan RI Tahun 34 Tahun 2005 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.